



**PERNYATAAN SIKAP
Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi**

Mengenai

Tuntutan Kenaikan Upah Minimum Propinsi (Ump)

Bismillahirrahmaanirrahiim

**PARTAI MASYUMI:
Sejahterakan Buruh, Tingkatkan Daya Saing Usaha
dan Hapuskan Pungli**

Jakarta, 25 November 2025 - Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026, dinamika antara tuntutan buruh dan respon pengusaha kembali mengemuka. Serikat buruh melalui KSPSI/Partai Buruh dan KSPI menuntut kenaikan UMP sebesar **8,5%–10,5%**, dengan dasar perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai komponen utama. Buruh menilai kenaikan ini penting untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, pengusaha melalui Apindo dan Asosiasi Bisnis menilai tuntutan tersebut terlalu tinggi dan berpotensi membebani perusahaan. Mereka menekankan bahwa kenaikan upah harus mempertimbangkan kemampuan usaha, daya saing industri, serta risiko relokasi dan pemutusan hubungan kerja. Pengusaha lebih mendorong agar upah minimum dijadikan batas bawah, sementara penyesuaian lebih tinggi dilakukan melalui perundingan bipartit di tingkat perusahaan.

Ketegangan antara tuntutan buruh dan kekhawatiran pengusaha ini menuntut perlunya solusi yang adil, rasional, dan dapat diterima semua pihak. Dan untuk menanggapi hal tersebut, Partai Masyumi, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Partai Masyumi menegaskan bahwa UMP harus tetap menjadi instrumen utama untuk menyejahterakan pekerja dan keluarganya. Buruh adalah tulang punggung produksi nasional, sehingga kesejahteraan mereka tidak boleh dikorbankan. Namun, kenaikan upah harus tetap rasional, berbasis pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan KHL sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 168/2023).
2. Namun Partai Masyumi menekankan bahwa kenaikan upah harus tetap dapat dinegosiasikan agar tidak memberatkan pengusaha. Beban yang terlalu tinggi akan menurunkan daya saing perusahaan, memicu relokasi industri, dan bahkan berpotensi mengakibatkan PHK massal. Oleh karena itu, ruang dialog bipartit antara buruh dan pengusaha harus difasilitasi pemerintah untuk menemukan titik keseimbangan.
3. Partai Masyumi juga menilai bahwa salah satu akar masalah biaya tinggi di dunia usaha bukan hanya soal upah, melainkan adanya pungutan liar (pungli) dan biaya tidak wajar yang muncul dari praktik birokrasi yang tidak bersih. Beban biaya semacam ini menggerus kemampuan perusahaan untuk menaikkan upah buruh. Karena itu, Partai Masyumi mendesak pemerintah melakukan terobosan serius dengan menegakkan birokrasi yang bersih dan efisien, memberantas pungli di semua lini, serta menghapus praktik jatah preman, termasuk preman birokrasi. Dana yang selama ini bocor ke pungli harus dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan buruh.
4. Selain itu, tingginya rasio ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Indonesia pada angka 6, dan termasuk yang tertinggi di ASEAN (tahun 2024), yang disebabkan

oleh tingginya biaya logistic (23–24% dari PDB), distribusi barang dan energi masih terkonsentrasi di Jawa dan produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah, menjadi tugas besar pemerintah yang harus segera mencari terobosannya. Karena itu Partai Masyumi mendorong pemerintah untuk menurunkan rasio ICOR ini, dengan kebijakan strategis, antara lain dengan menurunkan biaya logistic untuk angkutan barang, memperbaiki infrastruktur transportasi, dan menghapus biaya-biaya tidak produktif dalam rantai distribusi. Dengan ICOR yang lebih rendah, memungkinkan perusahaan akan memiliki ruang fiskal lebih besar untuk menaikkan upah buruh tanpa kehilangan daya saingnya.

Dengan demikian, *Kesejahteraan buruh tidak boleh dikorbankan, tetapi daya saing usaha juga harus dijaga. Pemerintah wajib memberantas pungli dan menurunkan skor ICOR agar ruang fiskal perusahaan dapat dialihkan untuk peningkatan upah buruh,*".

Partai Masyumi percaya bahwa kesejahteraan buruh, keberlanjutan usaha, dan birokrasi yang bersih adalah tiga pilar utama untuk membangun ekonomi nasional yang adil dan berdaya saing. Dengan sikap ini, Partai Masyumi mengajak pemerintah, pengusaha, dan buruh untuk bersama-sama membangun ekosistem ekonomi yang sehat, di mana buruh sejahtera, pengusaha berdaya saing, dan birokrasi bersih. Akhir kata, semoga menjelang tahun 2026 ini, dapat dicapai kesepakatan UMP yang adil untuk semua, demi Indonesia yang berkah.

Jakarta, 25 November 2025

Dewan Pimpinan Pusat Partai Masyumi



Dr. Ahmad Yani, SH., MH
Ketua Umum

Samsudin Dayan, SH., M.Si
Sekretaris Jenderal